

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMELIHARAAN OBJEK PEMAJUAN  
KEBUDAYAAN DI KAMPUNG ADAT CIKONDANG KABUPATEN  
BANDUNG**

***IMPLEMENTATION OF CULTURAL ADVANCEMENT OBJECT  
MAINTENANCE POLICY IN CIKONDANG TRADITIONAL VILLAGE  
BANDUNG DISTRICT***

**M. Indra Komara<sup>1</sup>**

**Pandji Santosa<sup>2</sup>**

<sup>1,2)</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana

*3mangiindra@gmail.com*

---

**ABSTRAK**

Masalah dalam penelitian ini adalah belum optimalnya Implementasi Kebijakan Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan di Kampung Adat Cikondang Kabupaten Bandung. Pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2016: 133-136) yang terdiri dari enam dimensi yaitu : ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (disposisi), komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana koordinasi, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Berlandaskan pada pendekatan teori tersebut, peneliti merumuskan proposisi : Implementasi Kebijakan Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah di Kampung Adat Cikondang Kabupaten Bandung akan berjalan optimal jika melaksanakan dimensi ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (disposisi), komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana koordinasi, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif, sedangkan data diperoleh melalui studi pustaka, observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan Pemeliharaan Objek Kebudayaan di Kampung Adat Cikondang dalam pelaksanaannya terdapat hambatan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Pemeliharaan Objek Kebudayaan di Kampung Adat Cikondang dengan memverifikasi kawasan Kampung Adat Cikondang sebagai salah satu situs cagar budaya yang ada di Kabupaten Bandung.

**Kata Kunci :** Implementasi Kebijakan, Pemeliharaan Kebudayaan, Kampung Adat Cikondang

## ABSTRACT

*The problem in this study is that the Implementation Of Cultural Advancement Object Maintenance Policy In Cikondang Traditional Village Bandung District, has not been optimized. The theoretical approach used in this research is Policy Implementation according to Van Meter and Van Horn in Agustino (2016: 133-136) which consists of six dimensions, namely: policy size and objectives, resources, characteristics of implementing agents, attitudes/tendencies (dispositions), interorganizational communication and coordination implementing activities, as well as the economic, social and political environment. Based on this theoretical approach, the researcher formulates a proposition: Implementation Of Cultural Advancement Object Maintenance Policy In Cikondang Traditional Village Bandung District will run optimally if it implements the dimensions of policy size and objectives, resources, characteristics of implementing agents, attitudes / tendencies (dispositions), inter-organizational communication and coordination implementing activities, as well as the economic, social and political environment. The research method used is descriptive research method, with a qualitative approach, while data is obtained through literature study, participant observation, in-depth interviews and documentation. The results showed that the Cultural Advancement Object Maintenance Policy in Cikondang Traditional Village in its implementation had obstacles. Efforts are made to overcome obstacles in the implementation of the Cultural Advancement Object Maintenance Policy in Cikondang Traditional Village by verifying the Cikondang Traditional Village area as one of the cultural heritage sites in Bandung District.*

**Keywords:** *Policy Implementation, Cultural Preservation, Traditional Village Cikondang*

### 1. PENDAHULUAN

Kebudayaan daerah di Kabupaten Bandung merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai aset nasional. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas masyarakat Kabupaten Bandung di tengah dinamika perkembangan sosial budaya masyarakat. Kampung Adat Cikondang merupakan salah

satu warisan budaya yang ada di Kabupaten Bandung, yang mana di dalam Kampung Adat ini sarat akan objek-objek Kebudayaan yang wajib untuk dipelihara oleh pemerintah Kabupaten Bandung sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah, pada pasal 19 yang menjelaskan bahwa perlu adanya pemeliharaan terhadap objek kebudayaan yang dilakukan

khususnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya objek pemajuan kebudayaan tersebut. Pemeliharaan dalam kebijakan ini merupakan salah satu bagian dari kegiatan perlindungan dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan. Namun berdasarkan pengamatan di lapangan kegiatan pemeliharaan objek kebudayaan itu belum berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan temuan di lapangan diantaranya belum terwujudnya tujuan Pemerintah Daerah untuk menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek pemajuan kebudayaan dan mewariskan objek pemajuan kebudayaan kepada generasi berikutnya di Kampung Adat Cikondang. Hal tersebut terlihat dari beberapa objek kemajuan kebudayaan seperti Alat tradisional yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kampung Adat Cikondang yaitu Lesung, dan juga beberapa kesenian musik Permainan Rakyat seperti Kaulinan Egrang, Kaulinan Galah kurang

terpelihara bahkan sudah mulai ditinggalkan oleh generasi muda yang lebih menyukai kesenian dan permainan modern.

Minimnya anggaran untuk melaksanakan kebijakan pemeliharaan objek kebudayaan di Kampung Adat Cikondang, hal ini ditunjukkan dengan sudah jarang pertunjukkan kesenian khas Kampung Adat Cikondang bahkan sudah mulai ditinggalkan oleh warga masyarakatnya. Selain itu petugas pemeliharaan kebudayaan di Kampung Adat Cikondang belum mempunyai kompetensi dalam hal pemeliharaan kemajuan kebudayaan, melainkan warga masyarakat yang mempunyai garis keturunan di Kampung Adat Cikondang.

Melihat latar belakang di atas, implementasi kebijakan merupakan hal yang begitu penting dalam merealisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah. Hal ini dikarenakan implementasi kebijakan merupakan suatu serangkaian tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Untuk itu penelitian ini mencoba mendeskripsikan bagaimana kegiatan implementasi kebijakan

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Implementasi

#### Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Sebagaimana dinyatakan Ripley dan Franklin dalam Handoyo, (2012: 94), implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau jenis kajian keluaran yang nyata (*tangible output*).

Meter dan Horn (1974) dalam Agustino (2017:126) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai :

“Tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang

pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan di Kampung Adat Cikondang Kabupaten Bandung.

ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan yang telaj diterapkan”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau didefinisikan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai actor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan kebijakan itu.

Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2016: 133-136) mengemukakan bahwa kinerja suatu kebijakan dapat dipengaruhi dan diukur oleh berbagai variabel yang saling membentuk keterkaitan antara variabel dengan kinerja kebijakan itu sendiri, yang diantaranya adalah :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan, ukuran dan tujuan kebijakan

harus jelas dan terukur karena ketidakjelasan standar dan sasaran kebijakan berpotensi untuk menimbulkan multi interpretasi yang akhirnya akan berimplikasi pada sulitnya implementasi kebijakan.

2. Sumber Daya Keberhasilan, keberhasilan suatu proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan public sangat sulit untuk direalisasikan. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu.
3. Karakteristik Agen Pelaksana, Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan public akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah

perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang ditetapkan.

4. Sikap/Kecenderungan Pelaksana, sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang implementor laksanakan adalah kebijakan dari atas yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.
5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana Koordinasi, koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksana kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat

dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi, dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan social, ekonomi, dan politik.

## **2.2 Konsep Pemeliharaan Kebudayaan**

Pemeliharaan secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan yang di perlukan untuk menjaga atau mempertahankan suatu objek agar dapat berfungsi dengan baik seperti kondisi awal. Kegiatan pemeliharaan kebudayaan tidak akan lepas dengan yang namanya kegiatan pelestarian kebudayaan. Hal ini dikarenakan kegiatan pemeliharaan kebudayaan merupakan salah satu kegiatan dalam serangkaian kegiatan pelestarian kebudayaan itu sendiri.

Secara normatif, kegiatan pelestarian kebudayaan itu sendiri mempunyai bahasa tersendiri yaitu

kegiatan pemajuan kebudayaan. Pemajuan kebudayaan ini sendiri merupakan sebuah kebijakan dari pemerintah pusat yang diturunkan ke pemerintah daerah sebagai upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya nasional di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan. Dalam konteks ini kegiatan pemeliharaan kebudayaan merupakan salah satu dari serangkaian kegiatan perlindungan kebudayaan dalam pemajuan kebudayaan, yang mana merupakan upaya untuk menjaga keberlanjutan kebudayaan daerah.

Adapun yang menjadi objek pemajuan kebudayaan diantaranya sebagai berikut; tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional dan cagar budaya.

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, karena penelitian ini bermaksud untuk mengungkapkan

kondisi Pemerintah Kabupaten Bandung dalam melaksanakan kebijakan Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan di Kampung Adat Cikondang Kabupaten Bandung.

Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian Metode deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang.

#### **4. PEMBAHASAN**

Berdasarkan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pada dimensi ukuran dan tujuan kebijakan bisa dikatakan cukup optimal, namun disayangkan pada para pelaksana kebijakan terlalu fokus pada salah satu objek kebudayaan saja, sedangkan jika diamati kampung

adat Cikondang ini mempunyai beberapa objek kebudayaan yang mempunyai potensi dalam dunia kebudayaan dan pariwisata.

Dalam dimensi sumber daya peneliti dapat mengatakan masih belum optimal. Hal ini dapat kita lihat dari jumlah petugas atau penggiat yang beraktivitas dalam pemajuan kebudayaan daerah kampung adat Cikondang yang masih belum memadai. Dikatakan demikian karena setidaknya di setiap kecamatan dalam sebuah daerah memiliki petugas atau penggiat budaya sebanyak satu orang. Selain itu ketersediaan sarana prasarana penunjang program kegiatan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan daerah kampung adat Cikondang sangat kurang dan masih dalam tahap pengembangan. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan Pemeliharaan kebudayaan di kampung adat Cikondang masih menggunakan bahan yang ada, hal ini berkaitan dengan sifat privat dari kampung adat Cikondang itu sendiri. Juga dalam ketersediaan anggaran pendukung dalam pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan daerah

kampung adat Cikondang masih kurang memadai. Hal ini dikarenakan masih kurangnya anggaran khusus untuk para penggiat kebudayaan di kampung adat cikondang khususnya insentif bagi para juru pelihara rumah adat Cikondang.

Mengacu pada dimensi karakteristik agen pelaksana, keterlibatan unsur pemerintah dalam kegiatan pemeliharaan objek kebudayaan ini bisa dikatakan cukup terlibat, meski keterlibatan itu hanya sebatas memberi amanat. Ketersediaan ahli dalam pelaksanaan Pemeliharaan kebudayaan di Kampung Adat Cikondang ini baru ada di tingkat Dinas, sedangkan di tingkat Desa dan Kecamatan bahkan di Kamung Adatnya belum terdapat ahli dan petugas yang mempunyai kredibilitas dalam hal memajukan kebudayaan daerah.

Dalam dimensi sikap/kecenderungan (disposisi) komitmen pelaksana sangat berdampak pada pelaksanaan kebijakan. Hal ini berkaitan dengan respon dan pemahaman tentang kebijakan itu sendiri. Namun

berdasarkan penelitian di lapangan menunjukkan belum adanya kesesuaian komitmen antar elemen pelaksana kebijakan atau dengan kata lain setiap elemen pelaksana kebijakan mempunyai komitmen yang berbeda dalam pelaksanaan pemeliharaan objek kebudayaan di Kampung Adat Cikondang.

Hal di atas nampaknya berkaitan dengan dimensi selanjutnya, yaitu dimensi komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksanaan koordinasi, yang mana dalam segi komunikasi dan koordinasi mengenai kebijakan pihak lembaga adat tidak mengetahui tentang adanya kebijakan yang mengatur tentang Pemeliharaan kebudayaan. Hal ini berkaitan dengan kurangnya sosialisasi dari pemangku kebijakan. Yang selanjutnya tentunya menjadi salah satu kendala, dimana kelompok sasaran kebijakan tidak tahu dengan apa yang menjadi landasan dasar mereka dalam menyelenggarakan kegiatan Pemeliharaan kebudayaan ini.

Namun demikian, Kampung Adat Cikondang memiliki kondisi

lingkungan sosial dan ekonomi yang bisa dikatakan sangat bagus dalam mendukung terselenggaranya kegiatan pemeliharaan kebudayaan. Hanya saja ada sedikit tantangan mengenai bagaimana mempertahankan budaya yang ada di Kampung Adat Cikondang. Hal tersebut dapat kita lihat dari beberapa nilai-nilai kebudayaan tertentu yang mulai terkikis seiring perkembangan zaman. Perkembangan zaman ini secara tidak langsung mengubah pola pikir masyarakat yang awalnya kental akan gotong royong menjadi sedikit lebih materialistis.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan dimensi lain selain dimensi-dimensi yang telah dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yaitu dimensi interpretasi. Interpretasi itu sendiri menurut Charles O. Jones dalam Agustino (2020) adalah menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.

Adapun alasan peneliti menambahkan dimensi interpretasi pada penelitian Implementasi Pemeliharaan Objek Pemajuan

Kebudayaan Di Kampung Adat Cikondang karena berdasarkan temuan di lapangan peneliti menemukan bahwa implementor kebijakan masih kurang optimal dalam menyampaikan substansi kebijakan kepada kelompok sasaran kebijakan.

Kebutuhan utama bagi pelaksanaan kebijakan adalah bahwa implementor harus mengetahui secara jelas apa yang seharusnya dilakukan, mereka harus memiliki cara pandang yang sama terhadap isi kebijakan. Jika kebijakan ingin dilaksanakan dengan tepat, arahan, dan petunjuk pelaksanaan tidak hanya diterima tetapi juga harus jelas. Jika masih terjadi ketidakjelasan mengenai apa yang seharusnya dilakukan implementor akan membuat mereka kebingungan, sehingga pada akhirnya mereka bertindak berbeda dengan pandangan dari atasan mereka, atau bahkan membuat kebijakan sendiri.

## 5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai kegiatan implementasi kebijakan pemeliharaan objek kebudayaan di kampung adat

cikondang, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kegiatan implementasi kebijakan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan di Kampung Adat Cikondang dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan dimensi-dimensi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2016: 133-136) yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (disposisi), komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana koordinasi, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik.
2. Faktor penghambat dalam kegiatan implementasi kebijakan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan di Kampung Adat Cikondang, diantaranya:
  - a. Kurangnya pendayagunaan objek kebudayaan yang ada di kampung adat Cikondang;
  - b. Masih kurangnya sumber daya, khususnya sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang kegiatan pemeliharaan kebudayaan;

- c. Arus globalisasi yang tak bisa di hindari, sedikit besarnya mengikis pola pikir Masyarakat adat;
- d. Belum adanya komitmen yang sama dalam kegiatan pemeliharaan kebudayaan;
- e. Kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan pemeliharaan kebudayaan oleh pemangku kebijakan terhadap kelompok sasaran.

Adapun faktor pendukung dalam kegiatan implementasi kebijakan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan di Kampung Adat Cikondang, diantaranya:

- a. Sumber daya alam yang melimpah dapat menjadi potensi dalam kegiatan pemeliharaan kebudayaan;
- b. Adanya dukungan anggaran khusus untuk pemeliharaan kebudayaan;
- c. Adanya kebijakan pemajuan kebudayaan menjadi salah satu payung hukum dalam kegiatan pemeliharaan kebudayaan;
- d. Adanya partisipasi Masyarakat yang besar

- terhadap kegiatan pemeliharaan budaya;
- e. Adanya dukungan dari pihak swasta.
3. Upaya upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam kegiatan Implementasi Kebijakan Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Di Kampung Adat Cikondang, diantaranya :
- a. Kawasan Kampung Adat Cikondang telah terverifikasi sebagai salah satu situs cagar budaya Kabupaten Bandung, untuk itu diharapkan hal ini menjadi salah satu upaya dalam menjaga keberlanjutan serta kelestarian kebudayaan yang ada di Kampung Adat Cikondang;
- b. Setiap setahun sekali selalu melaksanakan kegiatan upacara Wuku Tahunan, tepatnya pada tanggal 14 Muharam;
- c. Berupaya membangun kembali replika rumah adat, dengan tujuan menumbuhkan motivasi yang lebih tinggi dalam pemeliharaan

kebudayaan di Kampung Adat Cikondang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bogdan dan Taylor, 2010 dalam J. Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu Grup.
- Koentjanigrat. 2015. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Posdakarya.
- Subianto, Agus. 2012. *Kebijakan Publik*. Surabaya : Brilliant.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet

Suntoro Irawan & Hariri Hasan.

2015. *Kebijakan Publik*.

Yogyakarta: Graha Ilmu

Tresiana Novita & Duadji Noverman.

2017. *Kebijakan Publik*

*Teori dan Praktek Model-*

*model Pengelolaan*

*Pengembangan Daerah*.

Yogyakarta: Suluh Media.

## **B. Dokumen**

Peraturan Daerah Kabupaten

Bandung No 5 Tahun 2021

Tentang *Penyelenggaraan*

*Pemajuan Kebudayaan*

*Daerah*